

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adolf, Hual. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia.

Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media.

Fadjar, A. Mukhtie. 2004. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media dan In-TRANS

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.

Ishaq, H dan H. Efendi. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,

Kusnadi, Moh dan Bintar R. Saragih. 1993. *Ilmu Negara*.

Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: PT Alumni. 2013.

Manan, Bagir dkk. *Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhtaj, Majda El. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM: Menggurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rosyada, Dede dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh.

Sirahudin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara press

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukirno. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subakti, Ramlan. 1999. *memahami ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Syahmin. 1992. *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analitis*, Jakarta: Bina Cipta.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Yunas, Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

_____, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186.)

_____, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368.)

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor Imi-1489.Um.08.05 Tahun 2010
Tentang Penanganan Imigran Illegal

Instruksi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi
Nomor : Imi-Um.01.01-2827 Perihal Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi
Tanggal 30 Juli 2018

Instruksi Imigrasi Nomor : Imi-Gr.02.03-1910 Perihal Perubahan Kebijakan
Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Oleh Iom Tanggal 30 April 2018.

PERATURAN INTERNASIONAL

United Nations, *Charter of the United Nations 1950*.

UN General Assembly, *Statute of the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees 1950*. Statuta Komisariat Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi tentang
pemberian mandat oleh PBB kepada UNHCR untuk
menangani pengungsi global.

_____, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*.
Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951.

_____, *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*. Protokol
Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967.

_____, *Universal Declaration Of Human Rights 1948*. Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

_____, *International Covenant On Civil And Political Rights 1966*.
Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik 1966.

International Law Commission, *United Nations Articles On Responsibility Of States
For Internationally Wrongful Acts 2001*.

ARTIKEL, MAKALAH, DAN JURNAL

Edwards,Alice.2016.“*From Routine to Exceptional: Introduction to UNHCR’s Global Strategy—Beyond Detention 2014–2019: Supporting Governments to End the Detention of Asylum Seekers,*” *Refugee Survey Quarterly* 35.

Famakinwa.2011.*Interpreting The Right to Life*, Diametros No. 29 September 2011

Krustiyanti,Atik.2008.“*Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia Dan Timor Leste*”, *Jurnal Yustika*,Vol.II,No.1,.

Lubis,T.Mulya.1994.*hak-hak asasi yang tidak bisa dilanggar dalam negara hukum dalam majalah prisma nomor 11.*

Malahayati,dkk.2015.*Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia dalam Jurnal Nanggroe Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.*

Missbach, Antje.2017.*Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in “Alternatives to Detention”*. In *Refuge: Canada's Journal on Refugees/Refuge: revue canadienne sur les réfugiés.*

Muktiono. 2011. *Kewajiban Internasional Indonesia di bidang HAM. Makalah pada seminar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, tanggal 25 Maret 2011.*

Pelangi,Intan. 2017. “*Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999*”, PADJAJARAN, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 4.

Sidharta,Arief.2004.Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 3-Tahun II. J, PSHK.

Simamora, Janpatar.2014 “*Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Jurnal Dinamika Hukum.

Sultoni,Yahya et al.2014.*Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia.* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

UNHCR.2014.*Beyond Detention,A Global Strategy To Support Governments To End The Detention Of Asylum Seekers And Refugees.* Division of International Protection UNHCR.

UNHCR.2015.*Options Paper 2: options for government on open reception and alternatives to detention.*

MEDIA CETAK DAN WEBSITE

Refugees are human-just like everyone else we have hopes, dreams and aspirations by Abdullah Sarwari, 26 March 2018. Diakses melalui <http://news.trust.org/item/20180326073805-7ae51>

Executive Committee Of The High Commissioner's Programme Standing Committee number: EC/47/SC/CRP.7 about Social and Economic Impact of Large Refugees Populations on Host Developing Countries. UNHCR Standing Committee, 6 January 1997. Diakses melalui <https://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68d0e10/social-economic-impact-large-refugee-populations-host-developing-countries.html>

<http://reporting.unhcr.org/node/10335>

<https://www.nytimes.com/2018/01/26/world/asia/indonesia-refugees-united-nations.html>

merasa terasing pengungsi di Indonesia rentan bunuh diri.
<https://theconversation.com/merasa-terasing-pengungsi-di-indonesia-rentan-bunuh-diri-95072>.

Surviving: Detention, Abuse, and Neglect of Migrant Children in Indonesia.
<https://www.hrw.org/report/2013/06/23/barely-surviving/detention-abuse-and-neglect-migrant-children-indonesia>

UNHCR. “*Beyond Detention 2014-2019*”. <http://www.unhcr.org/53aa929f6.pdf>

Suaka, “*masalah perlindungan*”, <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>,

UNHCR Indonesia, *National Action Plan-Indonesia*, June 2017,
<https://www.unhcr.org/protection/basic/5666a2ea9/beyond-detention-national-action-plan-indonesia.html>.

Amy Pitonak, *Pressure to return? Afghan refugees protest at Indonesian Detention Centre*, april 2018, <https://www.afghanistan-analysts.org/pressure-to-return-afghan-refugees-protest-at-indonesian-detention-centre/>

Thomas Brown and Antje Missbach, *Refugee Detention In Indonesia*, May 2017,
diakses melalui <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/refugee-detention-indonesia>.

Penanganan pengungsi dari luar negeri akan gunakan APBN dan APBD. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3443019/penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri-akan-gunakan-apbn-dan-apbd> pada tanggal 16 Desember 2018.

Suicide, depression and poverty: Indonesia's Refugees bleak future now there's almost no change of being resettled by Angela Jelita diakses melalui <https://www.scmp.com/lifestyle/article/2137993/suicide-depression-and-poverty-indonesias-refugees-bleak-future-now-theres>

UNHCR Minta Pemerintah RI Upayakan Pemberdayaan Pengungsi Di Indonesia <https://www.liputan6.com/global/read/3490924/unhcr-minta-pemerintah-ri-upayakan-pemberdayaan-pengungsi-di-indonesia>

Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>

KARYA ILMIAH

Setiono.2004.*Rule of Law (Supremasi Hukum)*.Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nova,Adlya.2017. *Perlindungan Hak Azazi Manusia Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (konvensi 1951 dan protokol 1967)*. skripsi fakultas hukum program sarjana universitas sumatera utara.

WAWANCARA

wawancara dengan Pak Jaya Saputra selaku Kepala Bidang Detensi dan Deportasi Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 17 Desember 2018. Bersama dengan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mahasiswa S2 Universitas Pertahanan.

Wawancara dengan Ahmad Gym seorang pengungsi asal Afghanistan yang telah menjadi pengungsi dan menetap di wilayah Indonesia selama 4 Tahun.